

Optimalisasi kelebihan kas BUMDesma melalui investasi SDGs bond

Krist Setyo Yulianto^{1*}, Halim Dedy Perdana¹, Ria Ekanindya Widyaningsih¹, Pesi Suryani¹, Vivi Oktari¹, Hurian Kamela¹, Muhammad Adam Sudaryanto¹, Tanda Setiya², Taufik Raharjo², Oke Wibowo²

¹Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

²Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: krist.setyo.yulianto@ecampus.ut.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2026-03-23

Diterima: 2026-05-24

Diterbitkan: 2026-06-13



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Penulis

ABSTRAK

Pengelolaan kelebihan kas BUMDesma masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi investasi, pemahaman risiko, dan kesiapan tata kelola kelembagaan. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi pengelola BUMDesma UPK LKD Cikeusal mengenai SDGs Bond sebagai alternatif investasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan dana idle desa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sosialisasi daring melalui zoom untuk peningkatan literasi, workshop dan pendampingan teknis secara kolaboratif; dan evaluasi monitoring berbasis survei. Responden berjumlah 11 pengurus BUMDesma Cikeusal di Kabupaten Serang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta dari kondisi awal yang belum mengenal SDGs Bond menjadi pemahaman yang lebih baik mengenai potensi ekonomi, manfaat sosial, risiko investasi, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan investasi. Temuan penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya kesadaran bahwa kelebihan kas BUMDesma tidak hanya dapat dipahami sebagai dana simpanan pasif, tetapi juga sebagai aset kelembagaan yang perlu dikelola secara hati-hati, produktif, dan berkelanjutan. Kontribusi artikel ini terletak pada model pendampingan kolaboratif yang mengintegrasikan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi BUMDesma, dan mitra desa dalam penguatan literasi investasi berkelanjutan yang berpotensi direplikasi pada konteks BUMDesma lain. Implikasinya, program ini menegaskan pentingnya tata kelola, analisis risiko, dan pendampingan berkelanjutan sebelum BUMDesma mengambil keputusan investasi kelembagaan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: BUMDesma; dana idle; investasi; SDGs Bond

Cara mensitasi artikel:

Yulianto, K. S., Perdana, H. D., Widyaningsih, R. E., Suryani, P., Oktari, V., Kamela, H., Sudaryanto, M. A., Setiya, T., Raharjo, T., & Wibowo, O. (2026). Optimalisasi kelebihan kas BUMDesma melalui investasi SDGs bond. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(3), 728-739. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i3.25301>

PENDAHULUAN

Penguatan ekonomi desa membutuhkan tata kelola kelembagaan yang mampu mengelola aset dan sumber daya keuangan secara produktif. Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya menjalankan fungsi usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Agunggunanto et al. (2016) menunjukkan bahwa BUMDes dapat mendukung pembangunan desa mandiri, meskipun masih menghadapi kendala dalam kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha, dan partisipasi masyarakat. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Wibisono & Panuntun (2020), Kania et al. (2021) dan Sofianto & Risandewi (2021) bahwa fungsi BUMDes belum sepenuhnya optimal karena masih

terbatasnya pengetahuan pengelolaan organisasi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengembangan usaha, dan belum optimalnya inovasi usaha dan kerja sama kelembagaan.

Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan keuangan BUMDesma adalah adanya kelebihan kas atau idle cash yang belum dimanfaatkan secara produktif. Dalam konteks pengelolaan keuangan BUMDesma, kelebihan kas merujuk pada dana yang tersedia melebihi kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi masih tersimpan secara pasif dan belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi pengembangan usaha desa. Kondisi tersebut menjadi penting karena dana yang hanya tersimpan tanpa strategi pengelolaan yang tepat dapat mengurangi peluang BUMDesma untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pengembangan usaha dan masyarakat desa.

Permasalahan tersebut ditemukan dalam proses identifikasi awal kegiatan pengabdian. Hasil wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Asosiasi BUMDesma Lembaga Keuangan Desa Kabupaten Serang dan telaah data internal asosiasi menunjukkan bahwa Kabupaten Serang memiliki 27 BUMDesma dengan total aset sekitar Rp144 miliar. Salah satu BUMDesma yang memiliki potensi keuangan cukup besar adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Lembaga Keuangan Desa atau BUMDesma UPK LKD Cikeusal di Kabupaten Serang, yang memiliki kelebihan kas sekitar Rp5 miliar dan belum dimanfaatkan secara produktif. Potensi dana tersebut cukup besar, tetapi pemanfaatannya masih terkendala oleh keterbatasan literasi investasi, kehati-hatian pengurus dalam mengambil keputusan keuangan, serta belum adanya pendampingan teknis yang memadai dalam memilih instrumen investasi yang sesuai bagi BUMDesma. Dengan demikian, persoalan mitra terletak pada kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan kelebihan kas agar dapat diarahkan pada instrumen yang aman, akuntabel, dan memiliki manfaat ekonomi maupun sosial.

Keterbatasan literasi investasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelebihan kas desa. Pengurus BUMDesma UPK LKD Cikeusal perlu memahami karakteristik instrumen keuangan, potensi imbal hasil, risiko, likuiditas, legalitas, serta prosedur tata kelola sebelum mengambil keputusan investasi. Lusardi & Mitchell (2013) dan Lopus et al. (2019) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia dan dapat meningkatkan pemahaman yang berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan ekonomi secara lebih rasional. Dengan demikian, literasi investasi menjadi prasyarat penting agar pengelolaan kelebihan kas BUMDesma UPK LKD Cikeusal tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga memperhatikan risiko dan akuntabilitas kelembagaan.

Salah satu instrumen yang relevan untuk diperkenalkan dalam pengelolaan kelebihan kas desa adalah SDGs Bond. SDGs Bond merupakan instrumen pembiayaan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung program dan proyek yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui *SDGs Government Securities Framework* menegaskan bahwa penerbitan *Green and SDGs Securities* diarahkan untuk membiayai proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan serta mendukung agenda pembangunan 2030 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Soetjipto et al. (2021) juga mencatat bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan SDG Bond di pasar obligasi global pada 2021, dengan nilai penerbitan sebesar EUR500 juta untuk mendukung pembiayaan proyek sosial dan lingkungan.

Bagi BUMDesma LKD Cikeusal, pengenalan SDGs Bond penting bukan hanya karena instrumen ini memiliki potensi manfaat finansial, tetapi juga karena dapat memperluas pemahaman pengurus dan pengelola BUMDesma mengenai investasi yang memiliki dimensi sosial dan pembangunan. Dengan demikian, SDGs Bond dapat diposisikan sebagai instrumen pembelajaran investasi berkelanjutan bagi pengelola keuangan desa. Namun, pemanfaatan instrumen tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui penyampaian informasi secara umum. Pengurus BUMDesma UPK LKD Cikeusal perlu memahami mekanisme investasi, risiko, imbal hasil, prosedur pencairan, legalitas, dan kebutuhan tata kelola. Tanpa pendampingan yang memadai, kelebihan kas berisiko tetap tersimpan secara pasif atau dikelola tanpa analisis risiko yang cukup.

Kesenjangan utama yang ingin dijawab dalam kegiatan pengabdian ini adalah masih terbatasnya pendampingan yang secara khusus menghubungkan pengelolaan kelebihan kas desa dengan literasi investasi SDGs Bond. Studi terdahulu mengenai BUMDes umumnya lebih banyak menekankan aspek

kelembagaan, manajemen organisasi, pengembangan usaha, dan inovasi kelembagaan (Agunggunanto et al., 2016; Kania et al., 2021; Srirejeki, 2018). Sementara itu, kajian dan dokumen kebijakan mengenai SDGs Bond lebih banyak membahas instrumen ini pada level pembiayaan nasional, pasar keuangan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Soetjipto et al., 2021; Yunita et al., 2023). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengisi celah praktis dengan memperkenalkan pendampingan literasi investasi SDGs Bond sebagai upaya awal untuk memperkuat kapasitas pengelola BUMDesma UPK LKD Cikeusal dalam mengelola kelebihan kas secara lebih produktif dan akuntabel.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penguatan literasi investasi SDGs Bond bagi pengelola keuangan desa melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi BUMDesma, dan mitra desa. Pendampingan tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan produk investasi, tetapi juga membangun pemahaman risiko, kesadaran tata kelola investasi, dan kesiapan kelembagaan sebelum keputusan investasi dilakukan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menempatkan SDGs Bond sebagai solusi instan, melainkan sebagai instrumen edukasi investasi berkelanjutan yang perlu dipahami secara hati-hati, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi investasi pengurus BUMDesma dalam memahami SDGs Bond sebagai alternatif pengelolaan kelebihan kas desa. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai konsep SDGs Bond, potensi ekonomi, manfaat sosial, risiko investasi, dukungan kelembagaan, serta kebutuhan tata kelola yang akuntabel. Kontribusi utama kegiatan ini adalah tersusunnya praktik pendampingan literasi investasi berkelanjutan yang dapat menjadi dasar bagi pengelolaan kelebihan kas desa secara lebih produktif, hati-hati, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan BUMDesma UPK LKD Cikeusal dapat mengelola dana idle secara lebih produktif dan bertanggungjawab, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada BUMDesma UPK LKD Cikeusal, Desa Cikeusal, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemilihan mitra dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan adanya kelebihan kas yang belum dimanfaatkan secara produktif serta kebutuhan peningkatan literasi investasi berkelanjutan. Pemilihan secara *purposive* relevan digunakan ketika subjek atau mitra dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan kegiatan atau penelitian Etikan (2016). Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan, yaitu dari Februari hingga September 2025, dengan melibatkan 11 peserta yang terdiri atas pengurus dan pengelola BUMDesma.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif mitra dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, sosialisasi, workshop, simulasi, hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif menempatkan mitra sebagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks mitra (Leask et al., 2019). Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam evaluasi menekankan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk membangun pengetahuan bersama dan meningkatkan pemanfaatan hasil kegiatan (Cousins & Whitmore, 2004). Pendekatan kolaboratif diwujudkan melalui keterlibatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, SDGs Center PKN STAN, DJPPR Kementerian Keuangan RI, BRI Danareksa Sekuritas, DPMD Kabupaten Serang, serta Asosiasi BUMDesma UPK LKD Kabupaten Serang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi awal melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Asosiasi BUMDesma LKD Kabupaten Serang dan telaah data internal asosiasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti atau pelaksana kegiatan memperoleh informasi yang terarah, tetapi tetap memberi ruang untuk menggali isu-isu penting yang muncul selama proses wawancara (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021). Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan mitra, potensi kelebihan kas, kebutuhan literasi

investasi, serta kesiapan awal pengurus dalam memahami instrumen SDGs Bond. Temuan dari tahap identifikasi menjadi dasar penyusunan materi pendampingan yang berfokus pada pengenalan kelebihan kas, konsep investasi berkelanjutan, karakteristik SDGs Bond, manfaat ekonomi, manfaat sosial, risiko, legalitas, dan tata kelola investasi.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah sosialisasi dan literasi investasi SDGs Bond untuk memperkenalkan konsep kelebihan kas, investasi berkelanjutan, dan karakteristik SDGs Bond. Tahap kedua adalah workshop dan pendampingan teknis yang berfokus pada pemahaman manfaat, risiko, imbal hasil, legalitas, serta tata kelola investasi. Tahap ketiga adalah evaluasi dan monitoring untuk menilai perubahan pemahaman, persepsi, minat, dan kebutuhan pendampingan lanjutan.

Untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, kegiatan ini menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan sebelum kegiatan sosialisasi, sedangkan *post-test* diberikan setelah kegiatan pendampingan. Penggunaan *pre-test* dan *post-test* umum digunakan untuk melihat perubahan pengetahuan, pemahaman, atau sikap peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan program pengabdian (Dimitrov & Rumrill, 2003). Instrumen disusun berdasarkan sembilan aspek, yaitu persepsi terhadap SDGs Bond, dukungan pemerintah, harapan implementasi, potensi ekonomi, manfaat sosial, keterlibatan pemerintah, dampak terhadap tata kelola, ketertarikan investasi, dan kebutuhan pendampingan perguruan tinggi. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui frekuensi dan persentase, sedangkan data kualitatif dari wawancara, observasi, tanya jawab, dan jawaban terbuka dianalisis secara tematik.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan dengan meningkatnya literasi peserta mengenai pengelolaan dana idle dan investasi SDGs Bond, yang ditunjukkan melalui persepsi positif peserta terhadap pentingnya investasi berkelanjutan, munculnya minat awal untuk mempertimbangkan SDGs Bond, serta teridentifikasinya kebutuhan pendampingan lanjutan. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan yang terletak pada jumlah peserta yang relatif terbatas, evaluasi yang masih berbasis persepsi, serta belum adanya pengukuran dampak jangka panjang berupa realisasi investasi atau peningkatan pendapatan BUMDesma.



Gambar 1. Bagan proses metode pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan dan potensi mitra (*need assessment*) yang dapat dikembangkan pada BUMDesma UPK LKD Cikeusal. Identifikasi kebutuhan merupakan tahap penting dalam program pemberdayaan karena membantu memastikan bahwa intervensi yang dirancang sesuai dengan kondisi, masalah, dan kapasitas mitra sasaran (Leask et al., 2019). Berdasarkan hasil wawancara semi-terstruktur dengan pengurus Asosiasi BUMDesma LKD Kabupaten Serang dan telaah data internal asosiasi, diketahui bahwa BUMDesma UPK LKD Cikeusal memiliki kelebihan kas yang belum dimanfaatkan secara produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitra memiliki potensi keuangan yang cukup besar, tetapi masih membutuhkan penguatan literasi investasi, pemahaman risiko, serta tata kelola sebelum mengambil keputusan investasi.

Selain mengidentifikasi persoalan kelembagaan, kegiatan ini juga memetakan karakteristik peserta untuk melihat kesiapan awal pengelola BUMDesma dalam memahami investasi SDGs Bond. Profil peserta berdasarkan jabatan, usia, pengalaman investasi, dan pekerjaan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Demografi responden

No	Karakteristik	Jumlah	(Persentase)
1	Posisi Jabatan di BUMDes (People Number)		
	Direktur Bumdes	1	9,1%
	Ketua Pengelola Bumdes	6	54,5%
	Sekretaris Bumdes	1	9,1%
	Bendahara Bumdes	1	9,1%
	Anggota/Pengurus Lainnya	0	0%
	Tidak menjawab	3	27,3%
	Total	11	100,00%
2	Umur Responden		
	< 25 tahun	3	27,27%
	25-35 tahun	0	0,00%
	36-45 tahun	4	36,36%
	>45 tahun	4	36,36%
	Total	11	100,00%
3	Pengalaman Berinvestasi		
	Belum pernah	8	72,73%
	< 2 tahun	3	27,27%
	2-5 tahun	0	0,00%
	> 5 tahun	0	0,00%
	Total	11	100,00%
4	Pekerjaan		
	Mahasiswa	2	18,18%
	ASN/Pegawai Negeri	1	9,09%
	Pegawai Swasta	3	27,27%
	Direktur BUMDesma	1	9,09%
	Pengurus/Pengelola Bumdesma	4	36,36%
	Lainnya	0	0,00%
	Total	11	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, peserta kegiatan didominasi oleh ketua pengelola BUMDesma sebanyak 6 orang atau 54,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan diikuti oleh pengurus yang memiliki peran penting dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan kelembagaan. Keterlibatan pengelola utama penting karena efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus, tata kelola organisasi, serta kemampuan kelembagaan dalam mengelola potensi ekonomi desa (Kania et al., 2021; Srirejeki, 2018). Dari sisi usia, peserta terbanyak berada pada kelompok 36–45 tahun dan di atas 45 tahun, masing-masing sebanyak 4 orang atau 36,36% yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada pada usia yang relatif matang secara pengalaman organisasi.

Dari sisi pengalaman investasi, sebanyak 8 orang atau 72,73% peserta belum pernah berinvestasi, sedangkan 3 orang atau 27,27% memiliki pengalaman investasi kurang dari dua tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pengalaman investasi yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan tidak dapat langsung diarahkan pada keputusan investasi, tetapi perlu dimulai dari penguatan literasi dasar mengenai instrumen investasi, risiko, imbal hasil, legalitas, dan tata kelola. Hal ini sejalan dengan temuan Wendy (2024) bahwa literasi keuangan dan persepsi risiko berperan penting dalam membentuk kualitas keputusan investasi.

Terkait pemahaman peserta terhadap investasi SDGs Bond, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa seluruh peserta belum memahami SDGs Bond sebagai instrumen investasi berkelanjutan. Ketidaktahuan tersebut mencakup pemahaman tentang konsep SDGs Bond, potensi ekonomi, manfaat sosial, dukungan pemerintah, risiko investasi, serta relevansinya bagi pengelolaan kelebihan kas BUMDesma. Setelah kegiatan sosialisasi, workshop, dan pendampingan teknis, hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada hampir seluruh indikator. Sebelum kegiatan pendampingan, seluruh peserta atau 11 orang (100%) belum memahami investasi SDGs Bond. Setelah kegiatan dilaksanakan, sebanyak 9 orang atau 81,8% memahami SDGs Bond sebagai instrumen investasi berkelanjutan, 10 orang atau 90,9% memahami potensi ekonomi SDGs Bond bagi pengembangan BUMDesma, dan 9 orang atau 81,8% memahami manfaat sosial SDGs Bond bagi masyarakat desa. Selain itu, sebanyak 9 orang atau 81,8% memahami bahwa SDGs Bond perlu didukung transparansi dan akuntabilitas BUMDesma. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pendampingan dapat memperbaiki pemahaman awal peserta, sebagaimana pelatihan literasi keuangan terbukti dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan dan risiko investasi (Meiriasari et al., 2024). Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil *pre-test* dan *post-test* tingkat pemahaman peserta tentang investasi SDGs bond

No	Aspek Pertanyaan	Jawaban				Interpretasi Perubahan
		Pre-Test		Post-Test		
		Iya	Tidak	Iya	Tidak	
1	Pengetahuan mengenai apa itu SDGs Bond sebagai instrumen investasi berkelanjutan	-	11 orang / 100%	9 orang / 81,8%	2 orang / 18,2%	Terjadi peningkatan pemahaman awal mengenai relevansi SDGs Bond bagi pengelolaan kelebihan kas desa
2	Pemahaman mengenai dukungan pemerintah dalam implementasi investasi SDGs Bond	-	11 orang / 100%	5 orang / 45%	6 orang / 55%	Peserta mulai mampu menilai dukungan pemerintah, meskipun masih ada 4 orang / 36% yang menilai kurang memadai
3	Pemahaman bahwa SDGs Bond diperlukan sebagai alternatif pengelolaan kelebihan kas desa	-	11 orang / 100%	11 orang / 100%	-	Seluruh peserta mulai melihat SDGs Bond sebagai alternatif yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa
4	Pemahaman mengenai potensi ekonomi SDGs Bond bagi pengembangan BUMDesma	-	11 orang / 100%	10 orang / 90,9%	1 orang / 9,1%	Peserta mulai memahami peluang ekonomi SDGs Bond untuk optimalisasi kelebihan kas
5	Pemahaman mengenai manfaat sosial SDGs Bond bagi masyarakat desa	-	11 orang / 100%	9 orang / 81,8%	2 orang / 18,2%	Peserta mulai memahami bahwa SDGs Bond tidak hanya memiliki manfaat finansial, tetapi juga dimensi sosial
6	Pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan pemerintah dalam pendampingan investasi SDGs Bond	-	11 orang / 100%	7 orang / 64%	4 orang / 36%	Peserta mulai memahami pentingnya peran pemerintah dalam legalitas, koordinasi, dan pendampingan investasi
7	Pemahaman bahwa SDGs Bond perlu didukung transparansi dan akuntabilitas BUMDesma	-	11 orang / 100%	9 orang / 81,8%	2 orang / 18,2%	Peserta mulai memahami bahwa investasi perlu didukung transparansi, dokumentasi, dan pelaporan
8	Ketertarikan untuk mempertimbangkan SDGs Bond sebagai alternatif investasi	-	11 orang / 100%	8 orang / 72,7%	3 orang / 27,3%	Minat investasi mulai terbentuk, tetapi masih membutuhkan pendampingan lanjutan
9	Pemahaman mengenai pentingnya pendampingan perguruan tinggi dalam penguatan literasi investasi	-	11 orang / 100%	11 orang / 100%	-	Seluruh peserta menilai pendampingan akademik penting untuk memperkuat literasi investasi dan tata kelola keuangan

Sumber: Data *pre-test* dan *post-test* kegiatan PkM, diolah penulis (2025).

Perubahan pemahaman pada Tabel 2 sejalan dengan desain evaluasi kegiatan, yaitu pelaksanaan *pre-test* yang diberikan sebelum sosialisasi dan *post-test* yang diberikan setelah rangkaian pendampingan. Setelah pengisian *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi investasi SDGs Bond yang dilaksanakan secara daring pada 22 Februari 2025. Pada tahap ini, peserta memperoleh materi mengenai pengelolaan kelebihan kas, konsep investasi berkelanjutan, karakteristik SDGs Bond, potensi manfaat ekonomi, manfaat sosial, risiko dasar investasi, serta pentingnya tata kelola dalam pengambilan keputusan keuangan BUMDesma.



Gambar 2. Sosialisasi investasi SDGs Bond kepada BUMDesma Kabupaten Serang

Gambar 2 menunjukkan pelaksanaan sosialisasi investasi SDGs Bond kepada peserta BUMDesma UPK LKD Cikeusl. Kegiatan ini menjadi tahap awal yang penting karena mayoritas peserta belum memiliki pengalaman investasi. Dengan kondisi tersebut, penyampaian materi dilakukan secara bertahap dengan menekankan perbedaan antara dana yang tersimpan secara pasif, instrumen investasi, risiko, imbal hasil, dan potensi manfaat investasi berkelanjutan. Sosialisasi ini menghasilkan perubahan

awal dalam cara pandang peserta mulai memahami bahwa kelebihan kas BUMDesma UPK LKD Cikeusal tidak harus dibiarkan tersimpan secara pasif, tetapi dapat diarahkan pada instrumen yang lebih produktif dengan tetap memperhatikan keamanan, legalitas, risiko, dan akuntabilitas. Pemahaman ini penting karena penguatan tata kelola dan kapasitas keuangan BUMDes merupakan faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan dan keberlanjutan usaha desa (Brahmayanti & Febrianto, 2024; Kania et al., 2021).

Setelah tahap sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan workshop dan pendampingan teknis yang dilaksanakan pada 16 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan Universitas Terbuka dan PKN STAN dengan dukungan DJPPR Kementerian Keuangan RI, BRI Danareksa Sekuritas, DPMD Kabupaten Serang, serta Asosiasi BUMDesma UPK LKD Kabupaten Serang. Kolaborasi ini mempertemukan unsur akademik, pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra desa dalam satu proses pendampingan. Kegiatan ini menjadi penghubung antara kebutuhan mitra, pengetahuan akademik, dan praktik pengelolaan investasi.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan PkM Kolaboratif UT dan PKN STAN

Pelaksanaan kegiatan PkM kolaboratif antara Universitas Terbuka dan PKN STAN. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan literasi investasi tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi secara tunggal, tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran saling melengkapi. Perguruan tinggi berperan dalam edukasi dan pendampingan, pemerintah (DJPPR) memberikan perspektif kebijakan, lembaga keuangan (BRI Danareksa Sekuritas) memberikan penjelasan teknis produk investasi, sedangkan mitra desa memberikan konteks kebutuhan riil di lapangan.

Pada tahap workshop, peserta memperoleh penjelasan mengenai posisi SDGs Bond dalam pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia, termasuk pengalaman pemerintah dalam menerbitkan Green Sukuk, SDG Bond, dan Blue Bond pada tahun 2021. Studi Yunita et al. (2023) menunjukkan bahwa pengembangan *Green Bond* dan SDG Bond di Indonesia merupakan bagian dari upaya menjadikan agenda pembangunan berkelanjutan sebagai proposisi investasi yang dapat diterima pasar modal.

Selain itu, DJPPR juga menyampaikan contoh dampak penerbitan SDG Bond terhadap berbagai program pembangunan bahwa penerbitan SDG Bond telah dikaitkan dengan pembiayaan program seperti vaksinasi, beasiswa anak sekolah dasar, infrastruktur akses internet di daerah 3T, dukungan kepada petani, pelatihan dan dukungan modal usaha, pendidikan vokasi, Program Keluarga Harapan, serta dukungan bagi UMKM. Penjelasan ini membantu peserta memahami bahwa manfaat SDGs Bond tidak hanya berada pada level imbal hasil investasi, tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan program sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, SDGs Bond dapat dipahami sebagai instrumen investasi berkelanjutan yang menggabungkan tujuan finansial dengan manfaat pembangunan pada aspek soSial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Yunita et al., 2023).

Gambar 4 menunjukkan sesi penyampaian materi SDGs Bond oleh DJPPR Kementerian Keuangan RI. Substansi utama yang disampaikan adalah pengenalan SDGs Bond sebagai obligasi tematik pemerintah yang hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung pencapaian SDGs. Peserta juga memperoleh pemahaman bahwa penerbitan SDGs Bond dilatarbelakangi oleh besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, perlunya penyelarasan APBN dengan agenda SDGs, dan upaya memperluas basis investor Surat Berharga Negara. Materi ini penting

karena memberikan legitimasi kebijakan kepada peserta bahwa SDGs Bond bukan sekadar produk investasi pasar modal, melainkan bagian dari instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, materi DJPPR juga memperkenalkan aspek dasar Surat Utang Negara, termasuk definisi, bentuk, jenis, dan manfaatnya sebagai instrumen fiskal, moneter, dan investasi untuk membantu memahami posisi SDGs Bond dalam ekosistem Surat Berharga Negara. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai karakter instrumen, dasar penerbitan, serta manfaat yang dapat dipertimbangkan sebelum BUMDesma mengambil keputusan investasi.



Gambar 4. Penyampaian materi SDG's Bond oleh pihak DJPPR Kementerian Keuangan RI

Gambar 5 memperlihatkan sesi penyampaian materi produk investasi oleh BRI Danareksa Sekuritas. Materi ini memperkaya pemahaman peserta dari sisi teknis investasi, terutama mengenai karakter surat utang atau obligasi, tingkat risiko dan imbal hasil, serta perbandingan antara deposito dan obligasi. Dalam materi BRI Danareksa Sekuritas dijelaskan bahwa obligasi merupakan surat tanda bukti bahwa investor memberikan pinjaman kepada penerbit, dengan imbalan berupa kupon yang dibayarkan secara periodik dan pelunasan pada saat jatuh tempo. Penjelasan ini membantu peserta memahami logika dasar investasi obligasi sebelum mempertimbangkan SDGs Bond sebagai alternatif pengelolaan kelebihan kas.



Gambar 5. Penyampaian materi produk investasi oleh BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS)

Materi BRI Danareksa Sekuritas juga menekankan bahwa investasi surat berharga memiliki keuntungan dan risiko. Dari sisi keuntungan, surat berharga dapat memberikan kupon yang relatif lebih tinggi dibandingkan tabungan atau deposito konvensional, relatif lebih aman untuk instrumen yang diterbitkan negara, serta memiliki potensi *capital gain* apabila diperdagangkan. Namun, peserta juga diperkenalkan pada tiga risiko utama, yaitu risiko gagal bayar, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Penjelasan ini penting karena membantu peserta memahami bahwa keputusan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada imbal hasil, tetapi harus mempertimbangkan risiko, kebutuhan likuiditas, dan tata kelola kelembagaan.

Selanjutnya, tahap evaluasi dan monitoring dilakukan pada 26 September 2025 untuk menilai perubahan pemahaman, persepsi, minat, dan kebutuhan pendampingan lanjutan peserta setelah mengikuti rangkaian sosialisasi dan workshop. Pada tahap ini, peserta mengisi *post-test* dan kuesioner

evaluasi akhir. Hasil *post-test* digunakan untuk melihat perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan, sedangkan kuesioner evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kesiapan awal dan kebutuhan tindak lanjut.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian positif terhadap SDGs Bond. Sebanyak 81,8% peserta menilai investasi SDGs Bond penting hingga sangat penting, 90,9% menilai memiliki potensi ekonomi besar hingga sangat besar, dan 81,8% menilai memiliki manfaat sosial besar hingga sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami SDGs Bond bukan hanya sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai bagian dari pembiayaan berkelanjutan yang dapat dikaitkan dengan manfaat sosial dan pembangunan. Hal ini selaras dengan literatur yang menyatakan bahwa literasi keuangan dapat mendorong pemahaman dan minat terhadap investasi berkelanjutan (Senaya, 2024).

Selain itu, 81,8% peserta menilai bahwa SDGs Bond dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas BUMDesma. Temuan ini penting karena investasi desa tidak hanya berkaitan dengan imbal hasil, tetapi juga dengan tata kelola. Dengan kata lain, setiap keputusan investasi harus disertai prosedur, dokumentasi, persetujuan kelembagaan, dan pelaporan yang memadai. Penguatan tata kelola menjadi aspek penting dalam pengelolaan BUMDes karena kelembagaan desa yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan keberlanjutan usaha serta kepercayaan pemangku kepentingan (Kania et al., 2021; Srirejeki, 2018).



Gambar 6. Kegiatan evaluasi dan monitoring PkM kolaboratif UT-PKN STAN

Gambar 6 menunjukkan proses evaluasi dan monitoring kegiatan PkM. Tahap ini penting karena kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengukuran perubahan pemahaman peserta. Melalui evaluasi ini, tim pengabdian dapat mengidentifikasi aspek yang sudah dipahami peserta serta aspek yang masih memerlukan pendampingan lanjutan, seperti risiko investasi, imbal hasil, legalitas, prosedur pencairan, dan tata kelola investasi.

Sesi ini memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel sebelum keputusan investasi dilakukan. Dalam konteks keputusan investasi, minat awal perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman risiko yang memadai agar keputusan tidak bersifat spekulatif (Wendy, 2024).

Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari meningkatnya persepsi positif peserta terhadap SDGs Bond, tetapi juga dari beberapa indikator lain yang menunjukkan perubahan awal setelah pendampingan. Pertama, kegiatan berhasil meningkatkan literasi awal peserta mengenai SDGs Bond yang terlihat dari perubahan kondisi *pre-test* menjadi *post-test* dimana mayoritas peserta mulai memahami pentingnya SDGs Bond, potensi ekonomi, manfaat sosial, dan kaitannya dengan tata kelola BUMDesma. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi terstruktur dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat pemahaman investasi, khususnya bagi peserta yang memiliki pengalaman investasi terbatas (Lusardi & Mitchell, 2013; Meiriasari et al., 2024).

Kedua, kegiatan berhasil membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya pengelolaan kelebihan kas secara produktif. Sebelum kegiatan, peserta belum memahami secara memadai hubungan antara kelebihan kas dan alternatif investasi berkelanjutan. Setelah kegiatan, 90,9% peserta menilai SDGs Bond memiliki potensi ekonomi besar hingga sangat besar. Temuan ini menunjukkan adanya

perubahan cara pandang peserta terhadap kelebihan kas, dari sekadar dana tersimpan menjadi aset yang dapat dikelola secara lebih produktif.

Ketiga, kegiatan mendorong kesadaran terhadap manfaat sosial investasi. Sebanyak 81% peserta menilai SDGs Bond memiliki manfaat sosial besar hingga sangat besar. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa investasi tidak hanya dinilai dari aspek finansial, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Keempat, kegiatan memperkuat kesadaran tata kelola. Sebanyak 81,8% peserta menilai SDGs Bond dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas BUMDesma UPK LKD Cikeusal. Hal ini penting karena pengelolaan dana kelembagaan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta keberlanjutan Lembaga (Kania et al., 2021; Srirejeki, 2018).

Kelima, kegiatan menumbuhkan minat awal peserta untuk mempertimbangkan SDGs Bond sebagai alternatif investasi. Sebanyak 8 orang atau 72,7% peserta menyatakan tertarik terhadap investasi SDGs Bond, meskipun dengan syarat adanya sosialisasi lanjutan dan kepastian imbal hasil. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai melihat SDGs Bond sebagai instrumen yang potensial untuk pengelolaan kelebihan kas BUMDesma UPK LKD Cikeusal.

Keenam, kegiatan menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan berkelanjutan. Seluruh peserta atau 100% menyatakan bahwa pendampingan perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM tidak cukup berhenti pada sosialisasi atau workshop, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan teknis yang lebih spesifik, terutama terkait simulasi investasi, analisis risiko, legalitas, dan penyusunan pedoman tata kelola investasi BUMDesma UPK LKD Cikeusal. Ringkasan indikator keberhasilan kegiatan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator keberhasilan kegiatan

No	Indikator Keberhasilan	Hasil yang Dicapai	Makna Capaian
1	Peningkatan literasi awal mengenai SDGs Bond	9 orang atau 81,8% peserta menilai SDGs Bond penting hingga sangat penting	Peserta mulai memahami relevansi SDGs Bond sebagai instrumen investasi berkelanjutan
2	Pemahaman potensi ekonomi	10 orang atau 91,9% peserta menilai SDGs Bond berpotensi besar hingga sangat besar	Peserta melihat peluang optimalisasi kelebihan kas melalui instrumen investasi
3	Pemahaman manfaat sosial	9 orang atau 81,8 % peserta menilai manfaat sosial SDGs Bond besar hingga sangat besar	Peserta mulai memahami dimensi sosial dan pembangunan dari investasi berkelanjutan
4	Kesadaran tata kelola	9 orang atau 81,8% peserta menilai SDGs Bond dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas	Peserta memahami pentingnya prosedur, dokumentasi, dan pelaporan dalam investasi
5	Minat awal investasi	8 orang atau 72,7% peserta tertarik dengan syarat sosialisasi lanjutan dan kepastian imbal hasil	Minat sudah muncul, tetapi masih membutuhkan pendampingan lanjutan
6	Kebutuhan pendampingan berkelanjutan	11 orang atau 100% peserta menyatakan pendampingan perguruan tinggi sangat dibutuhkan	Perguruan tinggi dipandang penting sebagai mitra penguatan kapasitas BUMDesma

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 3, kegiatan PkM menunjukkan capaian awal yang positif dalam meningkatkan literasi investasi peserta. Hal ini terlihat dari perubahan kondisi awal ketika seluruh peserta belum memahami SDGs Bond, menjadi mayoritas peserta memahami pentingnya SDGs Bond, potensi ekonomi, manfaat sosial, dan kaitannya dengan tata kelola keuangan BUMDesma. Namun, capaian tersebut masih perlu dibaca secara proporsional karena hasil kegiatan masih berbasis persepsi dan pemahaman peserta.

Lebih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku awal (*early awareness*) pada peserta, yang ditandai dengan meningkatnya minat untuk mempertimbangkan SDGs Bond sebagai alternatif pengelolaan kelebihan kas. Meskipun demikian, minat tersebut masih bersifat bersyarat. Beberapa peserta masih membutuhkan informasi lanjutan mengenai kepastian imbal hasil, prosedur pencairan, risiko, legalitas, dan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, kegiatan ini belum dapat diklaim sebagai bukti kesiapan penuh untuk melakukan investasi, melainkan sebagai capaian awal berupa peningkatan literasi, tumbuhnya minat, dan munculnya kesadaran risiko. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa literasi keuangan perlu diikuti dengan pemahaman risiko dan perencanaan agar dapat menghasilkan keputusan investasi yang lebih rasional (Lusardi & Mitchell, 2013; Wendy, 2024).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan kelebihan kas BUMDesma tidak hanya terletak pada ketersediaan dana yang belum dimanfaatkan secara produktif, tetapi juga pada keterbatasan literasi investasi, pemahaman risiko investasi, dan kesiapan tata kelola investasi. Melalui rangkaian identifikasi kebutuhan, sosialisasi, workshop, pendampingan teknis, serta evaluasi, kegiatan ini berhasil membangun pemahaman awal pengelola BUMDesma UPK LKD Cikeusal mengenai SDGs Bond sebagai salah satu alternatif instrumen investasi berkelanjutan yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial.

Temuan utama kegiatan ini adalah terjadinya perubahan cara pandang peserta terhadap kelebihan kas BUMDesma UPK LKD Cikeusal. Dana yang sebelumnya dipahami sebagai simpanan pasif mulai dilihat sebagai aset kelembagaan yang berpotensi dikelola secara lebih produktif, dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, risiko, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, capaian tersebut masih berada pada tahap literasi awal dan pembentukan kesadaran risiko, bukan pada tahap kesiapan penuh untuk melakukan investasi.

Rekomendasi strategis berdasarkan program pengabdian kepada masyarakat, antara lain pertama, pemerintah daerah bersama lembaga keuangan dan perguruan tinggi disarankan membentuk desa *investment center* sebagai wadah sinergi *triple helix* (pemerintah-akademisi-pelaku ekonomi lokal) untuk memfasilitasi pendampingan teknis dan konsultasi investasi berbasis SDGs. Kedua, Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat aspek legalitas dan tata kelola SDGs Bond di BUMDes dengan mengacu pada regulasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 11 tahun 2021 tentang BUMDes, dan Permendesa PDTT No. 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pengelolaan, dan Pembinaan BUMDes untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan investasi desa.

Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada pengembangan model pendampingan kolaboratif untuk optimalisasi dana idle BUMDesma melalui literasi investasi SDGs Bond. Kegiatan ini juga mengintegrasikan peran perguruan tinggi sebagai fasilitator akademik, pemerintah sebagai penguat kebijakan dan legitimasi, lembaga keuangan sebagai penyedia pemahaman teknis produk investasi, serta asosiasi dan pengelola BUMDesma sebagai aktor lokal yang memahami kebutuhan riil kelembagaan desa.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada jumlah peserta yang relatif terbatas, evaluasi masih berbasis persepsi serta belum terdapat pengukuran dampak jangka panjang berupa realisasi investasi, peningkatan pendapatan BUMDesma, atau perubahan kinerja keuangan kelembagaan. Kegiatan ini memberikan implikasi bahwa penguatan ekonomi desa melalui BUMDesma membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada akses terhadap instrumen investasi, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan pendampingan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka (LPPM-UT) atas dukungan dan pemberian hibah pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *JACCP: Journal of The American College of Clinical Pharmacy*, 4(10), 1358–1367. <https://doi.org/10.1002/jac5.1441>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395>
- Brahmayanti, I. A. S., & Febrianto, G. N. (2024). The influence of financial literacy on financial resilience through financial planning (Study on BUMDes in East Java). *Ekspektra*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.25139/ekt.v8i1.7339>

- Cousins, J. B., & Whitmore, E. (2004). Framing participatory evaluation. *New Directions for Evaluation*, 1998(80), 5–23. <https://doi.org/10.1002/ev.1114>
- Dimitrov, D. M., & Rumrill, P. D. (2003). Pretest-posttest designs and measurement of change. *WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation*, 20(2), 159–165. <https://doi.org/10.3233/WOR-2003-00285>
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Thematic bonds and sukuk goverment securities framework, report, and allocation & impact of thematic bonds and sukuk. In kemenkeu.go.id. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Leask, C. F., Sandlund, M., Skelton, D. A., Altenburg, T. M., Cardon, G., Chinapaw, M. J. M., Bourdeaudhuij, I. De, Verloigne, M., Chastin, S. F. M., GrandStand, & Safe Step and Teenage Girls on the Move Research Groups. (2019). Framework, principles and recommendations for utilising participatory methodologies in the co-creation and evaluation of public health interventions. *Research Involvement and Engagement*, 5(1), 2. <https://doi.org/10.1186/s40900-018-0136-9>
- Lopus, J. S., Amidjono, D. S., & Grimes, P. W. (2019). Improving financial literacy of the poor and vulnerable in Indonesia: An empirical analysis. *International Review of Economics Education*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.iree.2019.100168>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. (2013). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2243635>
- Meiriasari, V., Ratu, M. K., Emilda, & Nurkholis, K. M. (2024). Financial literacy training in the South Alai Village Community, Lembak District, South Sumatra. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 1379–1383. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v7i3.4946>
- Senaya, G. (2024). Financial literacy and its role in promoting sustainable investment. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(1), 212–232. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.1.2986>
- Soetjipto, T., Hardiana, M. D., & Bootsman, A. (2021). *Indonesia meluncurkan obligasi SDGs pertama di Asia Tenggara untuk membawa agenda 2030 kembali ke jalurnya*. Indonesia.Un.Org.
- Sofianto, A., & Risandewi, T. (2021). Mapping of potential village-owned enterprises (BUMDes) for rural economic recovery during the COVID-19 pandemic in Central Java, Indonesia. *The 4th Geoplanning International Conference of Geomatics and Planning*, 887. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/887/1/012022>
- Srirejeki, K. (2018). Empowering the role of village owned enterprises (BUMDes) for rural development: case of Indonesia. *Journal of Accounting Management and Economics*, 20(1). <https://doi.org/10.32424/1.jame.2018.20.1.1018>
- Wendy, W. (2024). The nexus between financial literacy, risk perception and investment decisions: Evidence from Indonesian investors. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(3), 135–147. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(3\).2024.12](https://doi.org/10.21511/imfi.21(3).2024.12)
- Wibisono, A. F., & Panuntun, B. (2020). Optimalisasi fungsi BUMDES melalui inovasi dan manajemen organisasi sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa. *JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>
- Yunita, A., Biermann, F., & Vijge, M. J. (2023). Making development legible to capital: The promise and limits of ‘innovative’ debt financing for the Sustainable Development Goals in Indonesia. *Sage Journal*, 6(4), 2271–2294. <https://doi.org/10.1177/25148486231159301>